



Filosofi Sunda Dalam Konsep Lanskap Bangunan Kolonial di Kota Bandung

Sundanese Philosophy in the Landscape Concept of Colonial Buildings in the City of Bandung

Husna Izzati*, Andiyan, Wowo Adizar Darwin

Study Program of Architecture, Faculty of Science and Engineering, Universitas Faletehan, Bandung, Indonesia

*Corresponding author izaa.husna@gmail.com

Article history

Received: 21 Jan 2023

Accepted: 26 March 2023

Published: 30 April 2023

Abstract

Bandung has a unique landscape and is also a historic city with colonial architectural characteristics. The formation of Bandung City, could not be separated from the influence of colonialism, marked by the construction of Jalan Raya Pos. Colonial city planning was carried out by making a master plan, some with the south-north axis of the landscape concepts, but philosophically the south-north axis has been applied since the Regent of Bandung built the pendapa area. This fact raises the question of whether the concept of colonial buildings also adopts the concept of Sundanese philosophy. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and inductive logic analysis to produce generalized conclusions. From the results of this study, it was found that there was an influence of environmental contextual aspects, considerations of morphological forms, and political aspects in designing the landscape of colonial buildings in Bandung city.

Keywords: Bandung City; colonial; landscape; Sundanese.

Abstrak

Bandung memiliki bentang alam yang unik dan merupakan kota bersejarah dengan ciri khas arsitektur kolonial. Berdirinya Kota Bandung tidak lepas dari pengaruh kolonialisme, ditandai dengan dibangunnya Jalan Raya Pos oleh Gubernur Jenderal Daendels. Perencanaan kota kolonial dilakukan dengan membuat *master plan*, berikut area peruntukannya. Dalam perencanaan tersebut, aspek poros selatan-utara dari lanskap bangunan menjadi ciri khas *landmark* yang dibangun oleh kolonial, namun secara filosofis poros selatan-utara sudah diterapkan sejak Bupati Bandung membangun kawasan pendapa di awal terbentuknya kota. Dari fakta tersebut menimbulkan pertanyaan apakah konsep bangunan kolonial juga mengadopsi filosofi Sunda. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan analisis logika induktif untuk mengkaji beberapa area studi dan menghasilkan kesimpulan secara generalisasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan adanya pengaruh aspek kontekstualitas lingkungan, pertimbangan morfologi lanskap, dan aspek politik dalam merancang lanskap bangunan-bangunan kolonial di Kota Bandung.

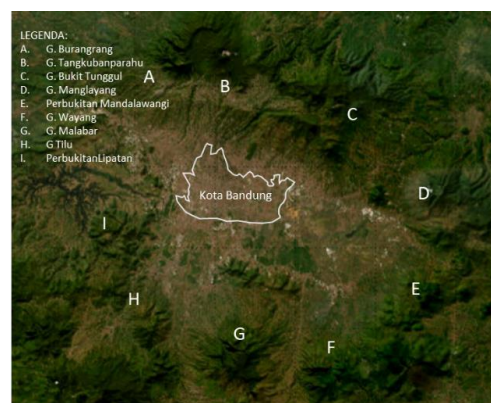
Kata kunci: Kota Bandung; kolonial; lanskap; Sunda.

1. PENDAHULUAN

Filosofi kebudayaan dan kaitannya dengan ilmu arsitektur merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Arsitektur adalah sebuah produk budaya yang lahir dari konsep seni dan teknologi yang merupakan kombinasi dari pengetahuan, dengan mempertimbangkan aspek fungsi dan simbolik. Aspek simbolik selalu berhubungan dengan kepercayaan di mana di dalamnya ada kosmologi dan mitologi yang hidup di suatu masyarakat. Kebudayaan Sunda tidak lepas dari pengaruh metafisis dan teologis yang bersumber dari gejala alam, yang kemudian diinterpretasikan secara makna dan simbol. Masyarakat Sunda dalam kesehariannya sangat akrab dengan dongeng baik yang bersifat mistis dan humoris. Kisah-kisah tersebut merupakan ajaran yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan nasihat untuk hidup rukun dan menghargai alam.

Perkembangan arsitektur di Tatar Sunda mendapat pengaruh besar dari filosofi hidup dan kebudayaan yang turun temurun mengakar di masyarakat. Salah satu mitologi yang berhubungan dengan lingkungan adalah mitologi tentang gunung. Masyarakat Sunda menganggap bahwa gunung merupakan pelindung yang mengayomi manusia dan menjaga dari bencana. Wilayah yang di kelilingi gunung, sungai, gunung api dan bukit merupakan salah satu faktor bahwa Bandung menyimpan banyak cerita, mitologi yang berhubungan dengan kondisi geografisnya (Johari, 2016). Masyarakat Sunda percaya bahwa ruang tidak memiliki esensi substansial, melainkan faktor keterkaitan atau relasional yang menghubungkan masyarakat dengan tempatnya berdiam. Berdasarkan hasil penelitian Perdana & Wahyudi, (2020), *Kabuyutan* atau tempat yang disakralkan oleh masyarakat Sunda Kuno berhubungan dengan kesadaran kondisi lanskap atau keadaan geografis di muka bumi, bisa berupa pegunungan atau punggung bukit. Lebih lanjut Dudley (dalam Dahlan, 2017), mengatakan bahwa masyarakat kuno mengapresiasi suatu lanskap dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritualnya, menjadi suatu tempat yang disakralkan sebagai penghormatan kepada Tuhan.

Sumbu selatan-utara diadopsi dari kepercayaan tradisional turun temurun yang ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana dataran tinggi Bandung di kelilingi oleh pegunungan dan perbukitan, sehingga secara tidak langsung poros selatan-utara yang dibuat juga menghadap ke puncak gunung. Bandung disebut sebagai Tatar Sunda atau Priangan atau '*Parahyangan*' yang memiliki arti sebagai tempat kedudukan para dewa, yang dipercayai berada di tempat-tempat tertinggi dan puncak-puncak gunung. Aspek kosmologis ini secara turun temurun dipercayai oleh masyarakat Sunda dan banyak dikisahkan dalam berbagai legenda dan cerita rakyat. Hal ini sejalan dengan bentukan lanskap Tatar Sunda yang memiliki bentang alam pegunungan dan perbukitan.



Gambar 1. Bentang alam pegunungan dan perbukitan di sekitar Bandung

Sumber: dimodifikasi dari bandung smart map plus, 2022.

Secara geomorfologi, Bandung merupakan cekungan yang terbentuk sejak zaman pleistosen, yang dahulunya berupa hamparan air yang luas yang dikenal dengan '*Situ Hyang*' (Brahmantyo & Bachtiar, 2009). Van Bemmelen (1935, dalam Voskuil 2017) menyatakan bahwa Danau Purba Bandung terbentuk akibat ter bendungnya aliran Sungai Citarum oleh material hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu, yang diperkirakan terjadi 11.000 tahun lalu. Proses penyusutan air danau purba berlangsung secara perlahan, yang pada akhirnya membentuk area basin dengan meninggalkan bekas genangan berupa *ranca* (rawa), *situ* (genangan air luas), *bojong* (tanjung), di berbagai area yang selanjutnya diberi nama berawalan sesuai bentang alam yang ada tersebut. Kajian mengenai keberadaan Danau Purba Bandung telah

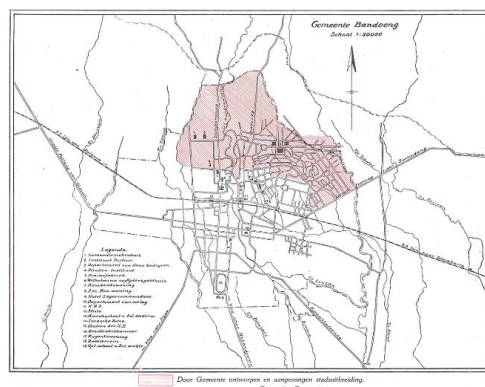
menghasilkan banyak penelitian geologi tentang dasar cekungan Bandung berikut penelitian tentang material geologi seperti endapan lumpur, lapisan tanah, lapisan bebatuan, dan juga berbagai penemuan artefak mengenai bukti keberadaan manusia pertama yang mendiami dataran tinggi Bandung.

Dari sejarah administratifnya, akhir era kerajaan di Dataran Priangan ditandai dengan ditaklukkannya Kerajaan Sunda oleh Kerajaan Mataram, yang selanjutnya mendirikan Kabupaten Bandung dengan ibu kota Krapyak, yang berada di area pertemuan Sungai Cikapundung dengan Sungai Citarum. Pada akhirnya Mataram menyerahkan Priangan kepada *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sekaligus menandai dimulainya era kolonial. Pascakebangkrutan VOC, masa pemerintahan Kolonial Belanda menjadi era baru bagi Bandung sebagai kota. Menurut Rusnandar, (2010) perkembangan Bandung di era kolonial dimulai dengan sebutan ‘surga di tempat pengasingan’ hingga ‘desa kecil yang cantik di pegunungan’ menggambarkan bagaimana lanskap Bandung saat itu. Di awal berdirinya Bandung merupakan ibu kota dari Kabupaten Bandung, yang dipindahkan oleh Bupati R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) dari Krapyak ke Kabupaten Bandung bagian tengah (pusat Kota Bandung sekarang), bersamaan dengan diresmikannya pusat pemerintahan pada 25 September 1810. Ketika Alun-Alun Bandung dibangun, dalam perletakan massanya berdasarkan prinsip-prinsip kosmologi, di mana Alun-Alun dianggap sebagai wilayah sakral yang membatasi pendapa dengan kampung. Sesuai dengan filosofi Sunda, Alun-Alun dan bangunan sekelilingnya dibuat menghadap ke utara di mana terdapat gunung Tangkuban Parahu. (Falah, dkk., 2019).

Di awal abad ke-20 Bandung sudah berkembang menjadi sebuah *Gemeente* dan berkembang menjadi *Stadgemeente*, yang memiliki wali kota dan pemerintahan sendiri. Adanya dua kubu pemerintahan wali kota dan bupati yang berbagi tugas mengurus masyarakatnya masing-masing, membentuk pola pemerintahan kota yang saling memengaruhi satu sama lain. Pembangunan Kota Bandung yang gencar dilakukan oleh kolonial, secara langsung berpengaruh pada

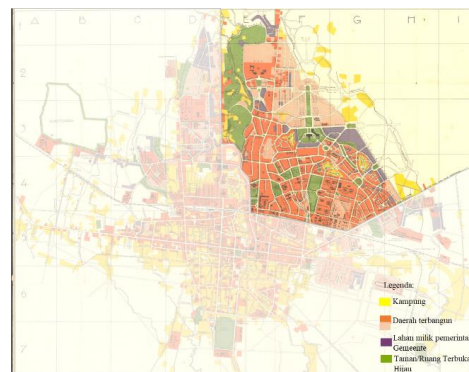
tingkat kehidupan masyarakat pribumi, demikian juga sebaliknya sumber daya manusia pribumi yang melimpah membuat bangsa kolonial memandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka mempertahankan area jajahannya.

Pembuatan *master plan* Bandung Utara yang dimulai tahun 1917 bertujuan untuk perluasan kota dan mempersiapkan perpindahan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung, dikembangkan dengan menggunakan konsep *garden city*, di mana lingkungan pusat pemerintahan dilengkapi dengan area permukiman dan taman-taman kota (Budiman, 2015; Falah, 2019). Pembangunan kawasan Bandung bagian utara menjadi tolak ukur perkembangan kota pada masa itu dengan melibatkan arsitek-arsitek yang didatangkan langsung dari Eropa. Setelah bangunan ini berdiri, umumnya menjadi *landmark* di Kota Bandung hingga saat ini, di mana bangunan-bangunan ini selain melahirkan gaya baru Arsitektur Indo-Eropa, juga beberapa memiliki poros selatan-utara.



Gambar 2. Rencana perluasan Gemeente Bandung tahun 1917

Sumber: KITLV-Leiden,2021



Gambar 3. Master plan kota tahun 1930

Sumber: dimodifikasi dari KITLV-Leiden,2022

Dari peta rencana perluasan dan peta planologi di atas dapat dilihat bahwa perluasan Kota Bandung di bagian utara lebih tertata dengan baik dan terlihat bahwa pola yang dibentuk antara ruang terbuka dengan lahan rencana dari kompleks pusat pemerintahan, memiliki poros mengarah ke utara, yang dilengkapi dengan lahan peruntukan untuk permukiman yang juga dilengkapi dengan rencana ruang terbuka hijau.

Sebagaimana diketahui, salah satu nilai kosmologi masyarakat Sunda adalah adanya penghormatan terhadap gunung. Oleh karena itu, dengan adanya bangunan-bangunan kolonial yang berporos selatan-utara menghadap ke gunung, di mana Tangkuban Parahu memiliki nilai kosmologi bagi masyarakat Sunda, apakah bangunan kolonial ini menggunakan filosofi masyarakat Sunda dalam perencanaannya? Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan filosofi dan kebudayaan masyarakat Sunda terhadap konsep pengembangan lanskap Kota Bandung yang dilakukan pada zaman kolonial. Penelitian ini melengkapi penelitian dari ranah arsitektur, di mana keterhubungan fisik secara arsitektur dengan bentang alam wilayah Bandung masih belum banyak dikaji. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat secara teoretis terhadap perkembangan ilmu arsitektur dan manfaat secara praktis terhadap pemangku kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan kota, arsitek, arsitek lanskap, dan bidang ilmu yang terkait.

2. METODE

Kajian ini fokus kepada lanskap bangunan-bangunan kolonial yang ada di Kota Bandung, dengan mengambil beberapa lokasi studi yang mewakili fungsi lanskap masing-masing yaitu lanskap Kawasan Balai Kota Bandung (*Gementee Huis*) di Jalan Wastukencana dan masuk ke area pusat kota dari awal terbentuknya Bandung, lanskap Kampus Institut Teknologi Bandung (*Technische Hoogeschool te Bandoeng/ THS*) di Jalan Ganesa, dan lanskap dari Kawasan Gedung Sate (*Gouvernements Bedrijven/ GB*) di Jalan Diponegoro, yang mewakili lanskap di area pengembangan *master plan* Bandung Utara

(*Uitbreidingsplan Bandoeng-noord*) sebagai area pusat pemerintahan baru.

Dari pembahasan yang dilakukan, kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang dilakukan dengan mengeksplorasi persoalan yang ada dan mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya, menekankan pada kajian literatur, pengalaman, pengamatan, dan pengetahuan (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini filosofi Sunda sebagai hasil olah dari akal, pikiran, pengetahuan, nilai, eksistensi, dan bahasa memiliki sifat fisik (*tangible*) maupun non fisik (*intangible*) yang dikembangkan secara induktif. Dalam menghasilkan logika induktif menurut Rosenberg (2005), menekankan pentingnya argumen tentang konteks pembenaran yang kemudian dapat digeneralisasi. Dari contoh kasus lanskap bangunan kolonial di Kota Bandung ditemukan logika induktif bahwa perletakan orientasi dari beberapa bangunan monumental kolonial di Kota Bandung adalah menghadap ke gunung.

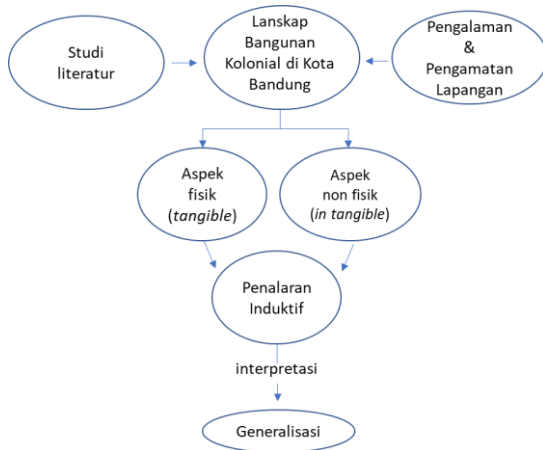
Proses analisis induktif dilakukan dengan menggunakan data lapangan kemudian ditarik suatu proposisi yang dapat digeneralisasi secara luas melalui interpretasi. Daliman (2012) menjelaskan bahwa fungsi interpretasi sebagai metode penafsiran sejarah mempunyai dua pengertian sebagai berikut:

1. Interpretasi dapat mengaitkan kembali fakta-fakta sejarah yang ada, sehingga terbentuk suatu rangkaian alur cerita yang logis yang menggambarkan sejarah kelompok masyarakat, maupun bangsa.
2. Interpretasi berfungsi juga sebagai eksplanasi sejarah karena pada dasarnya merupakan argumantatif dari kausal, yaitu relasi antara kausal dan nilai.

Persoalan kausalitas apakah x menyebabkan y dalam latar alamiah dapat dijelaskan, di mana apakah posisi Gunung Tangkuban Parahu yang berada di utara Bandung menyebabkan poros lanskap dan bangunan kolonial menghadap ke utara, sedangkan proses penarikan kesimpulan induksi di mana pengambilan kesimpulan

secara umum berdasarkan fakta khusus yang diperoleh.

Secara umum prosedur penelitian dapat dilihat pada skema gambar 4.



Gambar 4. Diagram prosedur penelitian
Sumber: hasil olah data, 2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ricklefs (1993 dalam Suryono 2013), Pemerintah Kolonial mengubah kebijakan pembangunan di Hindia Belanda berdasarkan rasa balas budi, yang dikenal dengan politik etis. Politik Etis diawali oleh pidato Ratu Wihelmina tahun 1901, yang telah mengubah kebijakan politik Kolonial Belanda menjadi lebih peduli terhadap kemakmuran rakyat Indonesia, termasuk dengan pembangunan di Kota Bandung.

Pada tahun 1906 Kota Bandung diberi status *Gemeente* (kotamadya) dan dinyatakan sebagai daerah otonom dengan luas daerah 1.922 hektare, yang berdampak pada meningkatnya jumlah orang Eropa yang mendatangi Kota Bandung. Peningkatan ini melatarbelakangi gagasan di kalangan elite Eropa bersama pejabat pemerintah kolonial untuk menciptakan kota yang nyaman sesuai dengan ukuran di negeri asalnya. Bandung pada masa kolonial memiliki perencanaan kota yang matang, di mana penataan kota dirumuskan dalam konsep rancangan *Master plan Gemeente Bandoeng* 1918-1923. Fokus pembangunan diarahkan pada kepentingan orang-orang Eropa. Dalam kurun waktu tujuh tahun (1918-1925) ratusan bangunan pemerintah dan perumahan untuk pegawai berhasil dibangun (Dienaputra, 2004: 18 dalam Budiman, 2015).

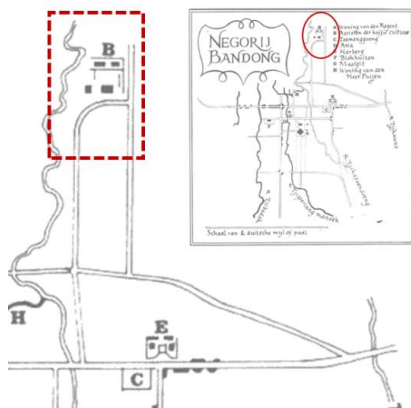
Pada gambar 5 terdapat area penelitian yang terdiri dari beberapa lanskap kolonial yang dibangun dengan konsep arsitektur Indo-Eropa berupa bangunan-bangunan pemerintahan dan fasilitas pendidikan tinggi yang didirikan di Kota Bandung, dimulai dari Gedung Balai Kota (*Gemeente Huis*), kompleks instansi pemerintah (*Gouvernements Bedrijven/GB*), dan kompleks Pendidikan *Technische Hoogeschool te Bandoeng/THS* yang kini menjadi Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Kompleks bangunan yang dibahas ini merupakan contoh kasus dari beberapa lanskap dan bangunan kolonial yang menggunakan konsep poros selatan-utara.



Gambar 5. Penerapan sumbu selatan-utara pada lanskap bangunan kolonial di Bandung
Sumber: hasil olah data berbagai sumber, 2021.

3.1 Balai Kota Bandung (*Gemeente Huis*)

Dalam peta perencanaan awal *Negorij Bandoeng* tahun 1925, lanskap dari lahan cikal bakal *Gemeente Huis* sudah ada dan merupakan batas paling utara dari Kota Bandung saat itu, yang merupakan rumah asisten perkebunan dan gudang kopi. Sejak awal, lanskap dari area rumah dan gudang ini sudah berbentuk persegi panjang dengan orientasi selatan-utara dan terdiri dari beberapa massa bangunan di dalamnya.

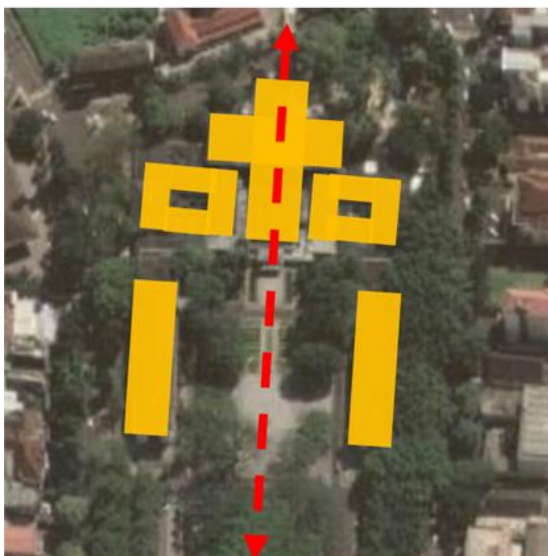


Gambar 6. Lanskap awal dari lahan *Gemeente Huis* pada peta tahun 1825
Sumber: dimodifikasi dari Kunto, 1985

Bangunan *Gemeente Huis* pada awalnya merupakan gudang kopi milik pribadi dari saudagar Belanda Andries de Wilde, yang pada tahun 1927 diserahkan kepada pemerintah, selanjutnya oleh pemerintah kolonial dibangun ulang sebagai balai kota (*Gemeente Huis*). Gedung ini dibangun oleh arsitek E.H. de Roo dengan gaya Amerika berupa atap bangunan yang lebih landai (Suriastuti, dkk., 2014). Suriastuti, dkk. juga mengungkapkan bahwa lanskap bangunan balaikota juga memiliki prinsip nilai dan filosofi Sunda yang dapat dilihat dari pola penataan massa bangunan. Selain itu, untuk menunjang perilaku dan aktivitas manusia, terdapat unsur kepercayaan yang digambarkan oleh poros. Sistem penataan massa bangunan berporos, membentuk pola terpusat di mana terdapat satu massa utama dengan massa bangunan lain simetris sebagai penyeimbang. Penambahan bangunan tahun 1930-an di kiri dan kanan memperkuat poros bangunan yang dari pembangunannya sudah mengarah ke selatan-utara.

Pada era 1980-an dibangun Gedung di sisi timur dan barat balai kota dengan bentuk persegi panjang dari utara ke selatan,

walaupun secara fasad memiliki gaya arsitektur yang berbeda (Katam, 2014). Namun, secara lanskap hal ini memperkuat poros selatan-utara area balai kota.



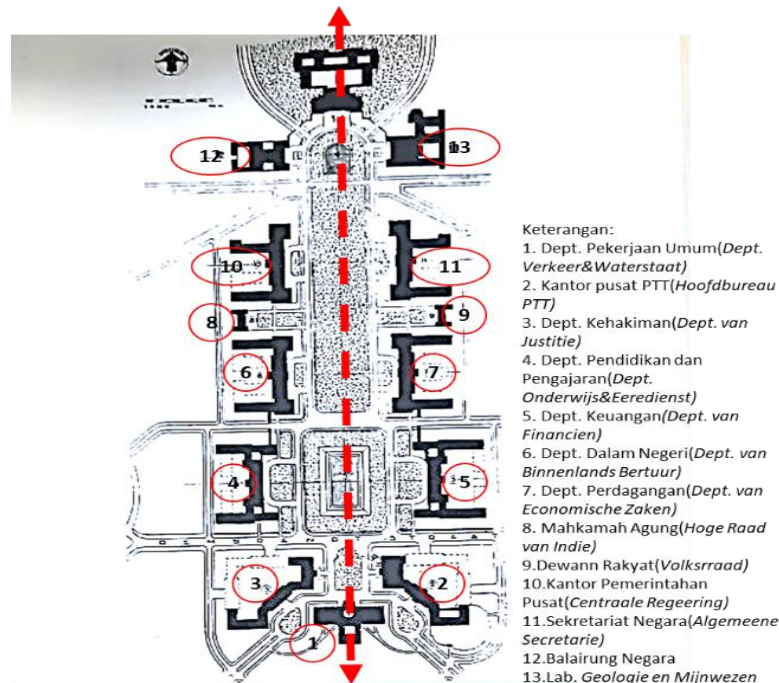
Gambar 7. Pola simetris dan poros selatan-utara lanskap Balai Kota Bandung
Sumber: hasil olah data berbagai sumber, 2022.

3.2 Gedung Sate (*Gouvernements Bedrijven/GB*)

Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 yang semula digunakan untuk *Departement Verkeer en Waterstaat* (Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan) bersamaan dengan pembangunan gedung *Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoondienst* (Pusat Pos, Telegraf, dan Telepon) di sisi timur laut. Gedung ini dirancang dalam satu kompleks

perkantoran untuk instansi pemerintah (*Gouvernements Bedrijven/GB*) dan dirancang tim yang dipimpin oleh Ir. J. Gerber. Pembangunan kompleks *GB* merupakan bagian dari program pemindahan pusat pemerintahan Hindia Belanda dari Batavia ke wilayah Bandung. Menurut Amanda (2016), Gedung Sate merupakan Gedung inti dari Kompleks *GB*, dengan sumbu yang langsung mengarah ke Tangkuban Parahu, dan pada mulanya hanya terdapat gedung sate dan gedung sayap timur. Penyempurnaan pembangunan sayap barat pada tahun 1977 yang dibuat simetris dengan sayap timur yang sudah ada membuat sumbu kawasan ke arah utara makin kuat.

Kompleks *GB* secara fasad menghadap lurus ke Tangkuban Parahu (Yudhistira A.P.H., dkk., 2009). Secara arsitektur, massa bangunan di kompleks *GB* adalah persegi panjang dengan pola perletakan massa yang simetris dan memiliki orientasi selatan-utara (Sadli, dkk., 2015). Menurut Budiman (2015), perpaduan antara kompleks *GB* dengan lingkungan sekitar berupa taman dan permukiman, memiliki penataan ruang yang simetris dengan poros selatan – utara. Kunto, (1986) mengemukakan bahwa Kompleks *GB* dibangun di bawah pimpinan V.L. Slors, direktur dinas bangunan Kotapraja, yang merancang tata letak bangunan dengan sumbu selatan-utara lurus pandang ke Tangkuban Parahu, dibantu oleh arsitek J. Gerber dalam merancang konstruksi bangunan. Terdapat tiga belas Gedung perkantoran yang direncanakan di kompleks tersebut.



Gambar 8. Pola simetris dan poros selatan-utara Kompleks GB
Sumber: Kunto, 1986.



Gambar 9. Pemandangan ke arah utara dari menara Gedung Sate, terlihat Gunung Tangkuban Parahu di porosnya.
Sumber: KITLV-Leiden; <https://jabarprov.go.id>

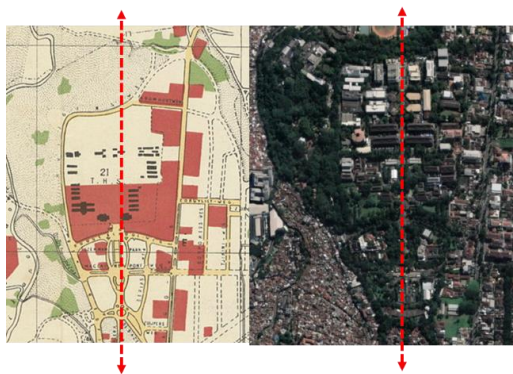
Orientasi fasad Gedung GB mengikuti sumbu poros selatan-utara, dengan sengaja menghadap ke Gunung Tangkuban Parahu di utara. Hal ini dapat dilihat sebagai desain yang memperhatikan lingkungan sekitar. Namun, fenomena filosofi Sunda yang menjadikan Tangkuban Parahu sakral menyebabkan konsep ini memiliki keterkaitan satu dengan lain. Dalam hal ini, Pemerintah Kolonial Belanda dalam membangun gedung pemerintahan juga memperhatikan aspek kontekstual seperti pertimbangan tapak dalam hal *view* dan bentuk lahan.

3.3 Institut Teknologi Bandung (*Technische Hoogeschool te Bandoeng/ THS*)

THS dirancang pada tahun 1918 oleh Arsitek Belanda MacLaine Pont menggunakan konsep tempat dan identitas. Kondisi bentang alam Bandung yang dikelilingi gunung menjadi inspirasi Ir. Henri Maclaine Pont dalam merencanakan *master plan* dan orientasi visual Kampus *THS*. Hal ini sekaligus menjadi acuan pengembangan struktur spasial yang terus dipertahankan dalam setiap tahapan pengembangan kampus hingga saat ini. Dalam hal ini, gedung-gedung pada *THS* didesain dengan konsep pemandangan ke utara sebagai porosnya. Perencanaan Kota Bandung dari awal yang menjadikan Gunung Tangkuban Parahu sebagai sumbu utama turut mengilhami Pont, sementara itu massa bangunan dibuat persegi Panjang dengan orientasi timur-barat. (Lie, 2021). Pada sumbu selatan di desain *Ijzerman Park* (Taman Ganesa) sebagai penguat konsep integrasi kampus dengan alam di sekitarnya. Dua bangunan yang dibangun sebagai bangunan induk yaitu Aula Barat dan Aula Timur, memiliki gaya arsitektur Indo-Eropa dengan ciri khas bentuk atap yang menyerupai rumah tradisional Indonesia (Kunto, 1985). *THS* secara resmi mulai beroperasi pada 3 Juli 1920, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik pada masa Kolonial Belanda akibat perang dunia pertama.



Gambar 10. Foto udara Kampus THS tahun 1928
Sumber: KITLV-Leiden



Gambar 11. *Master plan* Kampus THS (1926) dan ITB (2022)

Sumber: KITLV-Leiden; Google Maps.

Dalam konsep perencanaan tata letak maupun perancangan bangunan, dapat dilihat bahwa Maclaine Pont sangat mempertimbangkan identitas lokalitas dalam hal ini budaya dan kontekstualitas lingkungan dari bangunan yang dirancangnya.

4. KESIMPULAN

Pemerintah Kolonial Belanda dalam mengembangkan Kota Bandung, sudah memiliki konsep perencanaan yang jelas dan terencana berupa *master plan* perencanaan kota. *Master plan* tersebut selanjutnya diaplikasikan pada konsep perencanaan lanskap dan bangunan masing-masing, yang didesain oleh arsitek-arsitek yang ditunjuk. Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat dikatakan bahwa dalam mengembangkan konsep lanskap dan bangunan, aspek kebijakan penataan kota, aspek pertimbangan tapak, dan kondisi lingkungan sekitar menjadi pertimbangan utama. Aspek lainnya adalah kebijakan politik yang dilandasi rasa balas

budi atas keuntungan yang diperoleh Belanda selama masa penjajahan. Untuk membangun Hindia Belanda, pemerintah kolonial banyak menggunakan tenaga-tenaga asisten dari kalangan masyarakat pribumi, yang bisa memberi masukan tentang aspek filosofi masyarakat Sunda, sehingga pemerintah kolonial mendapat dukungan yang baik dari masyarakat pribumi. Walaupun filosofi poros selatan-utara pertama kali digunakan oleh Bupati Bandung dalam penetapan pusat pemerintahannya, filosofi ini tetap berlanjut digunakan oleh perencana kota dan arsitek-arsitek di sepanjang masa kolonial berkuasa. Kondisi morfologi Kota Bandung, yang lebih tinggi di utara, dan lahan untuk pembangunan di kawasan utara yang cenderung kosong, ikut memengaruhi orientasi visual lanskap kolonial. Aspek perkembangan kota yang sudah ada sebelumnya juga menjadi pertimbangan pemerintah kolonial, di mana dalam merencanakan pengembangan kota, selalu memperhatikan konsep pengembangan yang sudah ada sebelumnya. Dari kajian ini dapat dilihat bahwa aspek politik, kondisi bentang alam, dan kearifan lokal menjadi pertimbangan dalam perencanaan lanskap kolonial di Kota Bandung. Perkembangan kota yang memperhatikan aspek kesejarahan akan memberi dampak positif bagi pembangunan di Kota Bandung, salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan identitas Kota Bandung sebagai kota dengan peninggalan kolonial, di mana salah satu dari pertimbangan tersebut adalah unsur fisik berupa arsitektur kolonial.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama (HI) berperan sebagai pengusul ide penelitian dan pengembangan kerangka pikir penelitian, analisis, dan penyusunan laporan, penulis kedua (AN) membantu pengumpulan referensi, verifikasi data, pembahasan, sedangkan penulis ketiga (WAD) terlibat dalam validasi data dan penyusunan laporan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilakukan dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Faletehan dengan nomor kontrak 085/SPK-

L/LPPM-UF/VI/2022. Tim peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari LPPM Universitas Faletehan, Program Studi Arsitektur Universitas Faletehan, dan masyarakat Kota Bandung khususnya.

REFERENSI

- Adryana, Redi. 2016. Republik Persatuan Arab. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Amanda, R. 2016. *Kontekstualitas Desain Gedung Sayap Barat Dalam Kompleks Gedung Sate*. Universitas Katolik Parahyangan
- Budi Brahmantyo, and T. Bachtiar. 2009. *Wisata bumi cekungan Bandung*. Bandung: Truedee Pustaka Sejati.
- Budiman, H. G. 2015. Perkembangan Taman Kota Di Bandung Masa Hindia Belanda (1918-1942). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 7(2), 185.
- Dahlan, M. Z. (2017). *Kabuyutan Sacred Sites In The Sundanese Landscape of Indonesia: A Reevaluation from The Perspective of Sustainable Landscape Management* [Kyoto University]. <https://doi.org/10.14989/doctor.k20745>
- Daliman. A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Falah, M. 2019. Keletakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Bandung Akhir Abad Xix Hingga Pertengahan Abad Xx. *Sosiohumaniora*, 21(2), 130–139.
- Falah, M., Yuniadi, A., & Adyawardhina, R. 2019. Pergeseran Makna Filosofis Alun-Alun Kota Bandung pada Abad XIX – Abad XXI. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 11(2), 203.
- Johari, A. 2016. Representasi Mitos dan Makna pada Visual Lambang Daerah. *RITME Jurnal Seni Dan Desain Serta Pembelajarannya*, 2(1).
- Katam, Sudarsono. 2014. *Gementee Huis*. Bandung: Penerbit Kiblat.
- Kunto, Haryoto. 1985. *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: Penerbit Granesia.
- Kunto, Haryoto. 1986. *Semerbak Bunga di Bandung Raya*. Bandung: Penerbit Granesia.
- Lie, T. 2021. Kajian Arsitektur Kontekstual pada Sumbu, Simetri, dan Hirarki Bangunan Aula Barat ITB. *Jurnal Envirotek*, 13(1), 88–95.
- Perdana, G. C., & Wahyudi, W. R. (2020). Rekonstruksi Lanskap Kabuyutan Bandung Utara. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.24164/pw.v9i1.317>
- Rosenberg, A. 2005. Lessons from Biology for Philosophy of the Human Sciences. *Philosophy of the Social Sciences*, 35(1), 3–19.
- Rusnandar, N. 2010. Sejarah Kota Bandung Dari "Bergdessa" (Desa Udik) Menjadi Bandung "Heurin Ku Tangtung" (Metropolitan). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 2(2), 273.
- Sadli, M., Jaya P., C., & Dikusumah, R. I. 2015. Adaptasi Bangunan Baru Terhadap Bangunan Lama di Kawasan Konservasi Gedung Sate Bandung. *Reka Karsa*, 3(3), 1–17.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Suriastuti, M. Z., Wahjudi, D., & Handoko, B. 2014. Kajian Penerapan Konsep Kearifan Lokal Pada Perancangan Arsitektur Balaikota Bandung. *Jurnal Itenas Rekarupa © FSRD Itenas* /, 2(1).
- Suryono, A. 2015. Aspek Bentuk dan Fungsi Dalam Pelestarian Arsitektur Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda Era Politik Etis di Kota Bandung. *Bandung: Disertasi Universitas Katolik Parahyangan*.
- Voskuil, Robert P.G.A. 2017. *Bandung Citra Sebuah Kota*. Bandung. ITB Press.
- Yudhistira A.P.H., Armanto, R., & Soelami, F. X. N. 2009. Lighting Design for Axis of Gedung Sate and Monument of West Java People's Struggle. *International Conference on Regional Development, Environment and Infrastructure*, 1–7.